KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIS TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Defenisi	Cara Perhitungan
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang akuntabel dan tepat waktu x 100% Jumlah total laporan monitoring dan evaluasi
		Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tercapainya target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	Jumlah target kinerja x 100% Jumlah kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya dokumen RDP yang tersedia tepat waktu	Jumlah dokumen RDP x 100% Jumlah total total dokumen RDP yang tersedia tepat waktu
3	Meningkatnya Tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Jumlah pegawai yang mendapat layanan kepegawaian tepat waktu x 100% Jumlah total pegawai
		Persentase penegakan disiplin pegawai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kefektifan penegakan disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang disiplin x 100% Jumlah total pegawai
4	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi kepegawaian di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang terseleksi dengan transparan dan akuntabel x 100% Jumlah total seleksi pegawai

5	Terlaksananya proses seleksi Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Presentase Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku yang di seleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatab dan Paw	Jumlah data Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di seleksi x 100% Jumlah total Anggota KPU Prov dan Kab/Kota yang di seleksi
6	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	Jumlah data base pegawai yang tercatat akurat dalam data base kepegawaian x 100% Jumlah total data base pegawai
7	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya PNS yang diseleksi untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Tata Kelola x 100% Jumlah total Pegawai yang diseleksi
8	Pembentukan Badan Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	Pengukuran dalam satuan	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Tata Kelola x 100% Jumlah total Pegawai yang diseleksi
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Jumlah pejabat perbendaharaan 100% Jumlah total pejabat perbendaharaan
10	Terlaksananya sistem akuntasi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan secara tepat waktu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu
11	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya permasalahan pengelolaan keuangan di KPU Provinsi	Permasalahan pengelolaan keuangan x 100% Jumlah permasalahan pengelolaan keuangan
12	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran x 100% Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

13	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Jumlah Barang Milik Negara yang dapat dikelola x 100% Jumlah total Barang Milik Negara
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya laporan Barang Milik Negara KPU Provinsi di dalam SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	Jumlah laporan Barang Milik Negara yang sesuai dengan SAK x 100% Jumlah total Barang Milik Negara
14	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker	Jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik x 100% Jumlah total sarana transportasi pendukung kineria Satker
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik x 100% Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kineria Satker
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya gedung dan gudang milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Jumlah gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik x 100% Jumlah gedung dan gudang KPU
15	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Pengukuran dalam satuan presentase penggunaan ruang rapat dalam waktu yang bersamaan	Jumlah penggunanaan ruang rapat yang digunakan tidak bersamaan x 100% Jumlah ruang rapat KPU
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	Pengukuran dalam presentase tindak lanjut hasil rapat pleno paling lambat 4 hari kerja	Jumlah presentase rapat pleno yang di tindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja x 100% Jumlah pelaksanaan rapat pleno
16	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	Pengukuran dalam satuan presentase terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupatenn/Kota	Jumlah kasus gangguan keamanan yang dapat di tanggulangi x 100% Jumlah kasus ganggungan keamanan yang muncul
17	Meningkatnya kualitas tata kelola adminsitrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	Pengukuran dalam satuan persentase pada satuan waktu tertentu untuk melihat banyaknya arsip yang dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	Jumlah arsip yang dikelola sesuai jadwal Retensi Arsip (JRA) x 100% Jumlah total Arsip

18	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang dapat dipenuhi untuk menunjang kinerja pegawai	Jumlah sarana transportasi yang dapat dipenuhi x 100% Jumlah total sarana transportasi pendukung kinerja Satker
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Provinsi yang dapat dipenuhi untuk mendukung kinerja pegawai	Jumlah fasilitas perkantoran yang dapat dipenuhi x 100% Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja Satker
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya gedung dan gudang yang dapat dipenuhi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah gedung dan gudang yang dapat dipenuhi x 100% Jumlah gedung dan gudang KPU
19	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pengawasan baik internal maupun eksternal di lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah hasil pemeriksaan internal dan eksternal realisasi anggaran x 100% Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan internal dan eksternal realisasi anggaran
20	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti x 100% Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk
21	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU	Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah total rekomendasi BP.BPKP dan APIP
22	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Jumlah yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B x 100% Jumlah total nilai akuntabilitas kinerja minimal B
23	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan x 100% Jumlah total pegawai

		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya PNS KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhasil lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	Jumlah total PNS KPU lulusan S2 Tata Pemilu maupun program studi prioritas lainnya
24	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang undangan	Jumlah pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum sesuai PP x 100% Jumlah total produk hukum
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	Jumlah informasi produk hukum x 100% Jumlah total informasi produk hukum
25	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sengketa hukum yang yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa hukum yang yang dimenangkan x 100% Jumlah total sengketa hukum
26	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesesuaian jadwal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal x 100% Jumlah KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
27	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Kesigapan dan kemampuan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu 5 (Lima) hari kerja	Jumlah proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat selesai dalam waktu 5 x 100% Jumlah proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
28	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Fasilitasi yang didapat oleh Calon Peserta	Jumlah fasilitasi yang didapat oleh calon peserta x 100% Jumlah calon peserta Pemilu

29	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki pendidikan pemilih kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat Umum	Pengukuran tingkat Presentase Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi Masyarakat Umum	Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota x 100% Jumlah Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
30	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Perempuan		Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota x 100% Jumlah Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Pemula		Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota x 100% Jumlah Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Disabilitas		Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota x 100% Jumlah Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
31	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik	Jumlah data kepengurusan dan keanggotaan partai politik x 100% Jumlah partai politik
32	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota x 100% Jumlah Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
33	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah tindaklanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai dengan SOP) x 100% Jumlah total permohonan informasi
34	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya media yang mempublikasikan informasi tahapan Pemilu/Pemilihan	Jumlah informasi yang dipublikasikan x 100% Jumlah media publikasi
35	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Presentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	Pengukuran dalam satuan persentase hasil perolehan suara pada Pemilu 2024	Jumlah hasil perolehan suara hasil pemilu 2024 x 100 % Jumlah Suara yang di tetapkan pada Pemilu 2024

36	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Kabupaten/Kota dalam menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku x 100% Jumlah total Kabupaten/Kota
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat banyaknya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan dan dokumentasi logistik Pemilu	Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun laporan dan dokumentasi logistik Pemilu x 100% Jumlah total KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
37	Ketersediaan Logistik Pemilu	Presentase Penyediaan Logistik Pemilu	Presentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah pemenuhan logistik pada saat pelaksanaan pemungutan suara x 100% Jumlah Logistik Pemilu yang di sediakan
38	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan	Jumlah data yang di mutakhirkan secara berkelanjutan oleh KPU x 100% Jumlah total KPU
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Pengukuran dalam satuan Kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sisteminformasu yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan	Jumlah Sarana dan Prasarana TI untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar x 100% Jumlah total Sarana dan Prasarana TI untuk Sistem Informasi KPU
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Provinsi dalam menggunakan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Jumlah Aplikasi yang digunakan KPU Provinsi x 100% Jumlah total Aplikasi

Ambon, Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku

SEKRETARIAT

Ilham